

**Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Kayoe Putih dalam Prespektif
Collaborative Governance**

Diccio Donarinto¹, Agus Widiyarta²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
1dicciodonarinto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze collaborative governance in the management of the Kayoe Putih Hill (BKP) tourist area. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The theory used in this study is Ansell and Gash's theory, which includes starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the collaborative process carried out in the management of the Kayoe Putih Hill (BKP) tourist area is running well. The collaborative process is carried out by dividing tasks and responsibilities between each party through good communication and cooperation, thus having a positive impact on the management of the Kayoe Putih Hill (BKP) tourist area.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Management, Kayoe Putih Hill (BKP)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa collaborative governance dalam pengelolaan wisata bukit kayoe putih (BKP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash yang meliputi, kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) dan proses kolaborasi (collaborative process). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan wisata bukit kayoe putih (BKP) berjalan dengan baik, Proses kolaborasi dilakukan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak melalui komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kawasan wisata bukit kayoe putih (BKP).

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Wisata, Bukit Kayoe Putih (BKP)

A. Pendahuluan

Indonesia berada dalam posisi silang yang strategis yaitu terletak diantara dua benua, Asia dan Australia serta terletak diantara dua samudra, samudra Pasifik dan samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia memiliki empat batas wilayah, meliputi wilayah Indonesia timur, wilayah Indonesia barat, wilayah Indonesia selatan dan wilayah Indonesia utara. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki keindahan dan kekayaan alam baik di daratan maupun perairan. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan baik daratan maupun perairan mencapai 8,3 juta km² menjadikan Indonesia negara terluas ke-7 di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia (Heni & Aprita, 2024).

Sektor pariwisata di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya salah satu pilar ekonomi nasional yang krusial. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Provinsi Jawa

Timur menawarkan ragam wisata mulai dari wisata alam, sejarah, hingga budaya. Beberapa destinasi terkenal, seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, dan Taman Nasional Baluran, telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2022, provinsi ini mencatat lebih dari 25 juta kunjungan wisatawan domestik. Namun, meski terdapat sejumlah destinasi utama, Jawa Timur masih memiliki banyak potensi wisata tersembunyi yang belum optimal dikembangkan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang kaya akan pesona alam, salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 1 Data Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Mojokerto

No.	Tahun	Jumlah Kunjungan
1.	2020	466.837
2.	2021	878.929
3.	2022	1.460.185
4.	2023	1.232.114

Sumber: (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023) Diolah oleh penulis

Tabel menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 466.837 kunjungan, yang meningkat secara signifikan menjadi 878.929 pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatatkan jumlah kunjungan tertinggi, yaitu 1.460.185, sebelum mengalami penurunan menjadi 1.232.114 pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa Mojokerto memiliki daya tarik wisata yang terus berkembang.

Kabupaten Mojokerto, yang dikenal dengan sejarah kerajaan Majapahit, memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Salah satu destinasi yang mulai dikenal adalah Bukit Kayoe Putih, yang menawarkan pemandangan alam yang indah serta suasana yang menenangkan. Bukit Kayoe Putih mendapatkan penghargaan sebagai wisata buatan terbaik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 pada acara Mojokerto *Tourism Award*. Wisata Kemitraan Bukit Kayoe Putih (BKP) yang dikelola oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto juga berhasil meraih predikat sebagai responden terbaik dalam kegiatan survei statistik

pariwisata Kabupaten Mojokerto (Perhutani, 2024)

Wisata Bukit Kayoe Putih didirikan oleh CV. Mitra Wisata Abadi pada Juni 2021 bersama dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan luasan area 5 Ha. Adanya kerjasama dalam pembentukan dan pengelolaan Wisata Bukit Kayoe (BKP) antara pemerintah melalui Perhutani, Swasta yakni CV. Mitra Wisata Abadi, dan keterlibatan masyarakat melalui LMDH Watu Blorok. Sejak berdiri pada tahun 2021 BKP terus mengalami pertambahan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Wisata Bukit Kayoe Putih sendiri memiliki beberapa wahana dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung, mulai dari foodcourt, kolam renang, taman bunga, rainbow slide, kereta untuk anak-anak dan masih banyak hal yang dapat dilakukan di Bukit Kayoe Putih.

Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2033 menjadi acuan dalam mengembangkan pariwisata di daerah tersebut. Perda tersebut mengatur

strategi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memaksimalkan potensi pariwisata, termasuk pengembangan Bukit Kayoe Putih. Dalam kerangka ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata merujuk pada suatu pendekatan yang melibatkan kerjasama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan pariwisata (Matthoriq et al., 2021). Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk berkolaborasi akibat adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak yang terlibat dalam proses pembangunan pariwisata. Keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada keterikatan dan komitmen semua stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Konsep *collaborative governance* menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. Keberhasilan proses pengembangan wisata tidak lepas dari

adanya keterikatan antara stakeholders (Nanda et al., 2024).

Pendekatan *collaborative governance* menawarkan solusi strategis untuk pengembangan wisata Bukit Kayoe Putih melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, akan tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sekaligus memberdayakan mereka melalui pelatihan dan pengembangan produk lokal (Dani Rahu & Suprayitno, 2021). Kemitraan dengan sektor swasta dapat memperkuat infrastruktur dan pemasaran destinasi, sementara perencanaan bersama akan memastikan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Promosi bersama di berbagai platform juga akan meningkatkan visibilitas Bukit Kayoe Putih sebagai tujuan wisata unggulan di Mojokerto, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut (Ansell dan Gash, 2008) yang memiliki 4 indikator keberhasilan diantaranya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan juga

proses kolaborasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Bukit Kayoe Putih Di Kabupaten Mojokerto.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Kayoe Putih (BKP). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta berlangsung, serta untuk menggali peran dan dinamika di balik pengelolaan wisata di BKP.

Penelitian ini menggunakan beberapa cara pengumpulan data mencakup melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan adalah menurut Miles dan Saldana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan di lapangan

berdasarkan analisa penulis dalam peristiwa yang memiliki korelasi dengan tema penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa prosedur dalam pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang akurat. Diantaranya ialah :

- a) Melakukan wawancara kepada informan.
- b) Melakukan observasi.
- c) Melakukan dokumentasi untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan yang dideskripsikan dalam penelitian penulis mendapatkan informasi mengenai proses kolaborasi yang dilakukan sehingga atas uraian yang dituangkan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran masing-masing pengelola dalam melakukan pengembangan wisata. Berikut uraian data hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kondisi Awal

Kondisi awal pada wilayah Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) merupakan tempat yang sangat sepi dan sangat minim kegiatan masyarakat karena wilayah ini

dianggap rawan kriminalitas. Sebelum digunakan sebagai tempat wisata wilayah Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) hanya digunakan sebagai hutan penghasil tanaman minyak kayu putih yang dikelola langsung oleh Perhutani, Kondisi perekonomian masyarakat sebelum Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) didirikan masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh penulis di lapangan kondisi awal dibentuknya kolaborasi pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dapat dikatakan baik. Terdapat motivasi dan komitmen pengelola untuk melakukan pengembangan kawasan hutan produksi menjadi destinasi wisata dengan pengembangan potensi wisata alam guna meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah sekitar dan mengurangi angka kriminalitas.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dilakukan dengan kolaborasi oleh 3 lembaga yakni KPH Perhutani Kabupaten Mojokerto sebagai pihak pemerintah, CV. Mitra Wisata Abadi sebagai pihak swasta dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai

pihak pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) masing-masing lembaga memiliki peranan masing-masing. Pembagian tugas antar pengelola dilakukan secara kolaboratif dengan tujuan untuk mengembangkan destinasi wisata yang dibangun. Bentuk desain kelembagaan yang dilakukan oleh pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) menunjukkan adanya tanggung jawab yang dilakukan melalui kolaboratif. Keterlibatan beberapa pengelola bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang terarah serta berkelanjutan.

Kepemimpinan Fasilitatif

Model kepemimpinan yang dilakukan dalam pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dilakukan dengan menerapkan kerjasama kolaboratif antar pihak pengelola, model kepemimpinan yang digunakan menempatkan posisi kerja yang sama namun tetap berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing pengelola. Kerjasama yang dilakukan antar pengelola selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam setiap pengambilan keputusan, setiap pihak diberikan kesempatan untuk

menyampaikan pendapat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan diskusi 3 arah dengan semua pihak yang terlibat. Peran Perhutani perlu melakukan cek perizinan serta cek dampak terhadap lingkungan, peran swasta dalam hal ini pihak CV sebagai investor harus melakukan verifikasi dan analisa untuk profit. Masyarakat yang terlibat juga harus dipikirkan untuk dampak kedepannya apakah nantinya akan menjadi kegiatan yang membuka peluang ekonomi baru atau tidak.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dilakukan dengan koordinasi bersama antar para pihak yang berperan sebagai pengelola. Dalam pengelolaan dan pengembangan wisata para pihak melakukan komunikasi dan diskusi yang dilakukan guna membahas pengembangan wisata. Kolaborasi yang dilakukan oleh pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) menunjukkan kerjasama yang baik, masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsi yang disatukan dalam sebuah wadah yakni diskusi bersama yang nantinya akan

menciptakan gagasan yang digunakan untuk mengembangkan wisata.

Dalam proses kolaborasi terdapat beberapa aspek yang mendukung keberhasilan kerja antar pihak pengelola.

a) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka dilakukan oleh pengelola wisata bukit kayoe putih (BKP) secara berkala dan mengutamakan komunikasi dalam membahas mengenai setiap rencana yang akan dilakukan sehingga menciptakan kolaborasi yang efektif dan terarah.

b) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) berpedoman pada profesionalitas kerja antar pengelola, dan sesuai dengan hasil penelitian Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) berjalan secara efektif karena mengedepankan komunikasi, koordinasi serta profesionalitas kerja antara para pihak.

c) **Komitmen Terhadap Proses**
(Commitment to Process)

Pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dalam proses kolaborasi harus memiliki komitmen terhadap proses, Komitmen terhadap proses harus selaras dengan tujuan utama pembentukan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP). Komitmen terhadap proses merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses kolaborasi pengembangan tempat wisata yang sebelumnya hanya hutan dengan potensi yang sangat banyak untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

d) **Pemahaman Bersama (Shared Understanding)**

Pada proses kolaborasi yang dilakukan oleh pengelola pemahaman bersama merupakan suatu hal yang sangat penting, Pemahaman bersama menjadi ujung tombak keberhasilan tujuan bersama pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dalam melakukan pengembangan wisata, Dengan adanya pemahaman bersama hubungan kerjasama yang terjalin antar pengelola menjadi lebih terstruktur, berkelanjutan dan

efektif sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pengembangan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP).

e) **Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)**

Hasil sementara yang didapatkan dari proses kolaborasi pengembangan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP). dengan keseluruhan pengelola yang terdiri dari KPH Perhutani Mojokerto, CV. Mitra Wisata Abadi, LMDH Watu Blorok telah berjalan dengan baik dan terstruktur.

Keberhasilan pengelola dalam mengembangkan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dapat dilihat dari perubahan kondisi kawasan hutan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai tempat produksi minyak kayu putih menjadi kawasan wisata yang produktif sehingga memberikan perubahan kondisi wilayah ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, pengelola juga berhasil mengubah kawasan hutan yang rawan menjadi tempat adanya tindakan kriminalitas karena sangat sepi hingga menjadi kawasan yang lebih ramai dan

aman karena adanya pengembangan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model *colaborative governance* dari Ansell dan Gash. Pemilihan model ini dilakukan karena dalam pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) ditemukan adanya kolaborasi antar pihak pengelola. Model *colaborative governance* dari Ansell dan Gash memuat beberapa model diantaranya adalah: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif serta proses kolaborasi yang menjadi bagian pendukung yang memberi kontribusi dalam proses kolaborasi. Kemudian inti dari model ini berbentuk suatu kolaborasi yang mana dalam proses pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) kolaborasi dilakukan oleh beberapa pihak yakni: Pemerintah melalui Perhutani, Pihak swasta melalui CV. Mitra Wisata Abadi, dan keterlibatan masyarakat melalui LMDH Watu Blorok.

Teori Ansell dan Gash berpedoman pada aturan penyelenggaraan yang transparan dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kolaborasi

dilambangkan melalui adanya aturan dasar yang mengikat pengelola yang melakukan kolaborasi, Desain kelembagaan diperlukan untuk menjalankan kolaborasi secara terarah sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis mendapatkan hasil bahwa desain kelembagaan oleh pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dilakukan dengan pembagian tugas dengan tanggung jawab masing-masing antar para pengelola. Pembagian tugas dilakukan untuk membentuk struktur kelembagaan yang mendukung adanya proses kolaborasi antar pengelola dalam proses pengelolaan wisata.

Menurut Ansell dan Gash hasil sementara ialah suatu tujuan yang tercapai atas adanya suatu kolaborasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan serta teori yang dikaji proses kolaborasi Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi, koordinasi serta kerjasama antar pihak berdasarkan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan serta pengembangan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) sehingga tercapai

tujuan bersama untuk mengembangkan wisata yang aman, produktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam proses pengembangan Wisata Bukit Kayoe (BKP) melibatkan beberapa pihak yakni pemerintah melalui Perhutani, pihak swasta melalui CV. Mitra Wisata Abadi, dan keterlibatan masyarakat melalui LMDH Watu Blorok. Dari hasil penelitian yang dikaji menggunakan teori *ansell dan gash* (2008). Pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan model kolaborasi dari teori *Ansell dan Gash*. Adapun beberapa kekurangan serta kendala yang ada namun keadaan tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu adanya kolaborasi yang dilakukan.

Penelitian ini memberikan beberapa saran serta masukan yang membangun, antara lain adalah:

1. Pengelola Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) diharapkan terus meningkatkan pengembangan

fasilitas wisata serta pelayanan dengan tetap memperhatikan kelestarian wilayah dan lingkungan.

2. Masyarakat sekitar diharapkan dapat terus dilibatkan dalam pengelolaan wisata sehingga adanya Wisata Bukit Kayoe Putih (BKP) dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
3. Komunikasi dan kerjasama dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pengelola diharapkan dapat dijaga sehingga dapat menciptakan pengelolaan wisata yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. (2008). Collaborative Governance. In Tim DAP Press (Ed.), *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (p. 75).
- Dani Rahu, P., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>
- Heni Marlina, & Aprita, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap

Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif. *The Juris*, 8(1), 87–94.

<https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1182>

Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 20–29.

Nanda, D. D., Suprastiyo, A., & Junadi. (2024). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Della*. 6(3), 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6280>

Perhutani. (2024a). *Wisata Bukit Kayoe Putih, Lokasi Wisata yang Edukatif, Sejuk dan Instagramable di Perbatasan Gresik – Mojokerto*.